

**ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN WONOSOBO**

Oleh :

Vicki Indra Prastiyono, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)

7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze how the performance of BPBD in overcoming landslide at Wonosobo District and to find out the factors that become the constraints on the BPBD's non optimal performance in overcoming landslide at Wonosobo District. This research is a qualitative descriptive by using purposive sampling to determine the performance of BPBD in overcoming landslide at Wonosobo District. Data collection techniques used in this research are through interview techniques, observation, and documentation. The data obtained were analyzed descriptively through the stages of data inventory, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that : BPBD's performance in overcoming landslide at Wonosobo district has not been running well because several obstacles are still encountered in several aspects such as productivity, service quality, and responsiveness. Factors causing the non optimal performance of BPBD in overcoming landslides include the lack of supporting equipment for landslide disaster management activities, limited human resources, and the slow pace recovery or rehabilitation of areas affected by disasters.

Keyword : Performance, Disaster Management, Productivity, Responsiveness

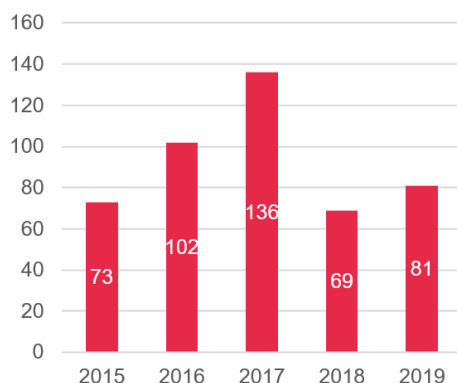
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Wonosobo memiliki potensi bencana tanah longsor yang cukup tinggi karena keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan sebesar (56,37%) kemiringan lereng antara 15 – 40%. Bencana tanah longsor merupakan bencana alam yang seringkali terjadi dan menjadi suatu hal yang umum di dengar oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Selama lima tahun terakhir bencana tanah longsor selalu hadir di Kabupaten Wonosobo.

Gambar 1.1

Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor



Sumber : BPBD Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015 - 2019 sangatlah tinggi, yaitu sebanyak 462 kejadian. Merespon banyaknya kejadian bencana yang sering terjadi, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga yang secara khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Wonosobo.

Melihat besarnya potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo, maka penanganan bencana tanah longsor harus dilakukan secara serius karena terjadinya tanah longsor dapat mengganggu proses pembangunan. Perlu usaha yang besar dari BPBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo. Besarnya usaha tersebut tercermin dari kinerja yang dilaksanakan oleh

BPBD Kabupaten Wonosobo selama menangani bencana tanah longsor.

Secara umum kinerja organisasi dapat dilihat dari aspek, produktivitas kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Aspek kinerja tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja BPBD dalam setiap proses penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor dapat dikatakan berjalan baik apabila telah memenuhi aspek kinerja yang sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. BPBD Kabupaten Wonosobo masih menemui berbagai macam hambatan yang membuat kinerjanya dalam menanggulangi bencana tanah longsor menjadi tidak optimal di beberapa aspek.

Aspek pertama yang belum terealisasi atau belum mencapai target

kinerja yaitu mengenai produktivitas. Tingkat produktivitas BPBD dalam membuat suatu program, kegiatan, maupun dokumen terkait upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor masih minim. Program yang dilaksanakan hanya Destana, dan dokumen yang dihasilkan yaitu hanya 2 dokumen pemetaan rawan bencana dan 1 dokumen rencana kontingensi.

Aspek kedua yaitu berkaitan dengan kualitas layanan, yang didalamnya BPBD belum mampu memenuhi peralatan yang menunjang kegiatan bencana tanah longsor terutama alat berat. Kemudian berkaitan dengan aspek responsivitas yaitu mengenai kecepatan respon untuk sampai ke lokasi bencana dan kurang cepatnya tindakan pemulihan atau rehabilitasi wilayah terdampak bencana tanah longsor.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo ?
2. Apakah faktor – faktor yang menjadi kendala tidak optimalnya kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam Penanggulangan bencana tanah longsor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
2. Melihat faktor - faktor yang menjadi kendala tidak optimalnya kinerja BPBD Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

D. Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menjadi teori dasar dalam pembahasan mengenai kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo. oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola (*manage*), keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Definisi administrasi publik juga dikemukakan oleh Dimock, & Fox (dalam Keban, 2014:5). Menurut mereka, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi ini melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik.

2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Robert T. Golembiewski (dalam keban, 2014:31) paradigma administrasi publik menitikberatkan pada fokus dan lokus. Fokus merupakan suatu metode atau cara untuk memecahkan sebuah persoalan, sedangkan lokus diartikan sebagai tempat dimana metode tersebut digunakan.

Nicholas Henry (dalam Keban, 2014: 31-33) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 - 1926)
2. Prinsip – Prinsip Administrasi Negara (1927 – 1937)
3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)
4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)
5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – sekarang)

3. Manajemen Publik

Manajemen publik masuk dalam ruang lingkup administrasi publik. Menurut Overman (dalam Keban, 2013: 92-93) yang menyatakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sahya Anggara (2016:542) bahwa manajemen publik yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dilaksanakan dengan menerapkan

fungsi – fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

4. Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh organisasi berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut M Mahsun (2006:20) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto untuk menganalisis bagaimana kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor, melalui beberapa indikator, antara lain :

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas

4. Responsibilitas

5. Akuntabilitas

5. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menurut Agus rahmat (2006:12) merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana.

Secara teknis dikemukakan oleh Carter (dalam Kodoatie, 2006:69) menyatakan bahwa tindakan penanggulangan atau pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu terapan (aplikatif) yang mencari dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan – tindakan (*measure*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

6. Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa tanah dalam jumlah besar yang bergerak pada bidang geser tertentu, di mana pada bidang tersebut tahanan tanah dalam menahan geseran

terlampau. Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006:193) longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya – gaya yang bekerja pada lereng atau gaya dorong di daerah lereng lebih besar dari gaya tahan yang ada di lereng tersebut.

Ada beberapa jenis longsor menurut Dikau (dalam Kodoatie, 2006:196) antara lain:

- Jatuh/runtuh (*fall*)
- Tumbang (*topple*)
- Gelincir (*slide*)
- Penyebaran (*spreading*)
- Kompleks atau gabungan

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan foto.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung serta data sekunder melalui studi pustaka.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, menfokuskan pada hal – hal yang penting, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengolah data

- Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.

- Kesimpulan dan verifikasi

Peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data, sehingga kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam menganalisa data kualitatif.

7. Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Dimana peneliti mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan, sehingga diperoleh informasi yang spesifik, sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

1. Produktivitas

BPBD Kabupaten Wonosobo berupaya untuk terus meningkatkan produktivitas organisasi baik dari segi produktivitas pegawai maupun program – program yang dilaksanakan sebagai salah satu tolak ukur dari kinerja yang telah dilaksanakan.

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan kapasitas para personil pada saat menanggulangi bencana tanah longsor secara berkelanjutan, BPBD Kabupaten Wonosobo setiap tahunnya selalu mengadakan program pelatihan Desa Tanggap Bencana (DESTANA) yang diagendakan secara rutin di berbagai Desa di sekitar wilayah Kabupaten Wonosobo. Saat ini sudah ada 9 Desa Tanggap bencana yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Wonosobo. BPBD menjadikan program ini menjadi program

unggulan yang selalu dilaksanakan setiap tahun sehingga memicu timbulnya rasa bosan dari para personil dikarenakan format program yang sama, hanya berbeda tempat saja.

Pengaruh adanya program atau pelatihan – pelatihan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan mutu hasil pekerjaan setidaknya telah memberikan pengaruh positif baik itu terhadap meningkatnya kapasitas personil, kemudian masyarakat yang semakin paham terhadap ancaman bencana, maupun kepada BPBD Kabupaten Wonosobo sebagai sebuah organisasi yang bisa semakin dekat dengan masyarakat.

Sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas, BPBD juga dilakukan dengan cara mengirimkan personil untuk membantu proses penanggulangan bencana di berbagai daerah. Beberapa waktu yang lalu gempa bumi yang terjadi di Lombok, kemudian ada bencana tanah longsor besar di Bogor. Melalui penugasan tersebut mereka bisa lebih memahami bagaimana langkah yang

harus dilakukan dan dipersiapkan ketika menghadapi bencana tersebut serta bisa beradaptasi apabila sewaktu – waktu Kabupaten Wonosobo mengalami bencana serupa.

2. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka penanggulangan bencana tanah longsor ini menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja organisasi terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan yaitu ketersediaan fasilitas fisik, , kepedulian terhadap pengguna jasa, kehandalan pegawai, dan keyakinan atau jaminan pelayanan.

Ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor yang berupa perlengkapan dan peralatan masih belum bisa tercukupi sepenuhnya. Peralatan – peralatan yang tersedia masih didominasi oleh peralatan yang tergolong kecil seperti cangkul,

sekop, dan gergaji. Sedangkan untuk peralatan yang sifatnya berat seperti bulldoser dan excavator BPBD masih belum mempunyai sama sekali. Selain itu, BPBD juga sudah mempunyai alat pendeteksi dini bencana tanah longsor (LEWS) yang tersebar di 8 lokasi.

Upaya untuk memberikan kualitas layanan juga tercermin dari tindakan BPBD sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor, BPBD Kabupaten Wonosobo memberikan sejumlah bantuan logistik kebutuhan pokok maupun logistik non pangan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki atau membangun rumah yang hancur terkena longsor seperti seng, grc, triplek dan bahan bangunan lainnya.

Berkaitan dengan jumlah pegawai di BPBD masih belum terpenuhi. Jumlah PNS di BPBD Kabupaten Wonosobo sebanyak 12 orang, kondisi tersebut berbeda jauh dengan jumlah pegawai non PNS yang ada yaitu 20 orang. Pegawai PNS biasanya difokuskan untuk menjalankan tugas – tugas secara

administratif di kantor BPBD sedangkan pegawai non PNS lebih ditujukan kepada tugas – tugas teknis di lapangan pada saat terjadi bencana.

BPBD Kabupaten Wonosobo dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga berusaha untuk memastikan keamanan masyarakat dari ancaman bahaya tanah longsor dengan cara memberikan edukasi terkait bahaya yang mengancam ketika tinggal di lokasi rawan bencana. Selain itu, BPBD juga memastikan kecukupan logistic bagi para korban bencana tanah longsor agar selalu terpenhi dengan cara mengecek ketersediaan di Gudang logistik secara berkala.

3. Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai kemampuan dari organisasi untuk merespon atau menanggapi berbagai macam jenis kebutuhan dari pengguna jasa dalam waktu yang cepat dan tepat sesuai dengan jenis kebutuhan yang diperlukan.

BPBD Kabupaten Wonosobo pernah beberapa kali mendapat keluhan maupun kritikan dari

masyarakat tetapi intensitasnya tidak sering. Biasanya yang menjadi perhatian dari masyarakat terutama persoalan lamanya waktu untuk sampai ke lokasi kejadian bencana tanah longsor. BPBD Kabupaten Wonosobo juga bersikap sangat terbuka jika memang terdapat kritik dan saran dari masyarakat terbukti dari ketersediaan sarana pengaduan masyarakat yang terdapat di dalam website resmi BPBD Kabupaten Wonosobo. Jika memang terdapat keluhan maka BPBD memastikan terlebih dahulu apakah keluhan tersebut memang terjadi atau tidak. Apabila memang terjadi kemudian langsung ditindaklanjuti.

BPBD Kabupaten Wonosobo menjadikan kritikan dari masyarakat sebagai salah satu sumber atau referensi dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan, karena melalui beragam kritikan yang diberikan, BPBD menjadi paham dimana letak kesalahan atau kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya. Seperti halnya mengenai persoalan kecepatan dalam menangani bencana tanah longsor,

yang selalu ditingkatkan proses penyelesaiannya.

BPBD Kabupaten Wonosobo berupaya mewujudkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, antara lain dengan memberikan peralatan – peralatan yang dapat digunakan untuk menanggulangi bencana tanah longsor yaitu EWS, kemudian menyediakan *call center* yang selalu siap jika sewaktu – waktu dibutuhkan oleh masyarakat, dan nantinya juga akan dikembangkan sebuah aplikasi yang berisi informasi – informasi kebencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BPBD Kabupaten Wonosobo tidak lupa mengikutseratakan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan penanganan bencana dengan melakukan pendekatan secara perlahan dengan mengenalkan BPBD kepada masyarakat, kemudian melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan melalui pemerintahan desa setempat untuk mengakomodir dan mengajak masyarakat agar lebih

aktif dalam setiap kegiatan dan upaya pengurangan resiko bencana.

4. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. BPBD Kabupaten Wonosobo selalu berusaha untuk memastikan kegiatannya di lapangan sesuai dengan kebijakan maupun standar yang berlaku.

BPBD Kabupaten Wonosobo selama ini sudah melaksanakan kegiatan penanganan bencana sesuai dengan standar operasional atau prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati No 35 Tahun 2011 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana tanah longsor. Pada peraturan tersebut sudah dijelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan ketika sedang menangani bencana tanah longsor, kemudian dengan siapa harus melakukan koordinasi serta diatur hal – hal lain terkait dengan kegiatan

tertentu pada saat terjadi bencana tanah longsor.

Pada saat menangani bencana di lapangan, personil BPBD dipimpin oleh komandan tanggap darurat, hal ini membuat semua perintah dan instruksi di lapangan merupakan kewenangan dari komandan tersebut, sehingga semua personil di lapangan harus mematuhi perintah yang diberikan. Komandan tanggap darurat juga berperan sebagai penghubung antara pimpinan BPBD dengan personil lapangan sehingga semua instruksi dari pimpinan bisa diinstruksikan melalui komandan tanggap darurat tersebut.

BPBD juga memastikan keamanan para personil ketika di lapangan dengan cara selalu menggunakan peralatan keamanan (alat pelindung diri) dan memperhatikan cuaca di saat sedang berada di lokasi bencana tanah longsor untuk menghindari hal yang mengancam keselamatan para personil. Peralatan – peralatan *safety* untuk melindungi diri merupakan peralatan wajib untuk digunakan pada saat menangani bencana, agar

terhindar dari ancaman cedera yang memungkinkan terjadi, peralatan tersebut biasanya meliputi helm, sarung tangan, dan sepatu. . Selain itu personil BPBD juga perlu memperhatikan kondisi cuaca yang sedang berlangsung di lokasi kejadian. Apabila cuaca buruk dan tidak memungkinkan jangan mengambil resiko untuk tetap melanjutkan kegiatan, karena memungkinkan terjadi longsor susulan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi karena berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban atau pemberian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang diberikan kepada masyarakat maupun instansi terkait.

Akuntabilitas hukum yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Wonosobo digunakan untuk menjamin kesesuaian antara kegiatan dengan peraturan atau hukum yang berlaku, yaitu dengan selalu berpedoman pada peraturan tertentu

dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Adapun peraturan – peraturan yang biasanya dijadikan pedoman oleh BPBD Kabupaten Wonosobo yaitu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian ada beberapa Peraturan Kepala BNPB (PERKA BNPB), PERMENDAGDRI, PERDA, dan berbagai macam peraturan yang terkait dengan kebencanaan lainnya.

Bentuk pertanggungjawaban secara manajerial atau akuntabilitas manajerial dari setiap seksi dilakukan dengan cara membuat laporan setiap tugas yang telah dilakukan oleh setiap seksi masing – masing kemudian diberikan kepada pimpinan BPBD, hasil laporan tersebut juga dibagikan kepada masyarakat melalui media sosial dan website BPBD, selain itu dilaporkan secara kedinasan kepada instansi yang berwenang untuk mengawasi BPBD seperti Inspektorat yang berfungsi sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Berkaitan dengan setiap program penanggulangan bencana tanah longsor seperti contohnya

program Desa Tanggap Bencana (DESTANA) dan penyusunan dokumen rencana kontingensi, terdapat laporan – laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat selaku pihak yang diikutsertakan dalam program, kemudian kepada institusi yang berkaitan dengan anggaran apabila program tersebut menggunakan anggaran daerah, seperti pelaporan kepada BPPKAD.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat yaitu dengan cara mengikuti prosedur atau tata cara penyelesaian di masyarakat yang disesuaikan dengan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan, dengan begitu kesalahan yang dibuat bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak berprasangka buruk kepada BPBD Kabupaten Wonosobo.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh BPBD juga harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Mekanisme pertanggungjawaban

dalam pengelolaan anggaran dilakukan dengan cara, BPBD selalu berkoordinasi kepada pihak yang berwenang yaitu BPPKAD (Badan Pengelola Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah). BPBD Kabupaten bekerjasama dari awal perencanaan anggaran sampai pada akhir pertanggungjawabannya.

B. Faktor – Faktor yang menjadi Kendala Tidak Optimalnya Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

1. Kurangnya Peralatan Penunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Ketersediaan peralatan yang menunjang kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor dapat dikatakan masih kurang dan sangat minim terutama peralatan – peralatan yang sifatnya berat seperti *excavator*, *buldoser*, maupun *scope loader*. BPBD meminjam dari Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan alat berat yang dibutuhkan ketika terjadi bencana yang membutuhkan penanganan cepat.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia atau biasa disebut personil BPBD sampai saat ini baik itu dari jumlah PNS maupun non PNS masih cukup minim, jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini membuat BPBD Kabupaten Wonosobo menjadi kesulitan ketika sedang menangani bencana tanah longsor yang besar atau ketika terjadi bencana bersamaan di beberapa tempat yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Wonosobo.

3. Kurang Cepatnya Tindakan Pemulihan atau Rehabilitasi Wilayah Terdampak Bencana Tanah Longsor

Wilayah terdampak bencana tanah longsor yang membuat hilangnya hunian masyarakat sehingga harus dibangun hunian di lokasi baru biasanya memakan waktu yang lama karena tergantung oleh berbagai faktor seperti ketersediaan lahan, anggaran, kemauan masyarakat untuk berpindah, serta koordinasi dengan instansi terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Wonosobo belum berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa dibuktikan melalui beberapa aspek antara lain:

Pada aspek produktivitas, Peningkatan produktivitas personil BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor belum bisa optimal karena tidak didukung oleh program atau kegiatan penanggulangan bencana yang baru dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Selama ini program unggulan yang selalu dilaksanakan adalah program desa tanggap bencana, yang sudah beberapa tahun ini berjalan dengan format yang sama, hanya berbeda tempat kegiatan saja, sehingga kurang efektif dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan personil.

Pada aspek kualitas layanan masih ditemukan kendala pada keterbatasan fasilitas – fasilitas fisik yang mampu mendukung kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor, yang mencakup alat – alat berat seperti *buldozer* dan *excavator*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi BPBD yang masih tergolong tipe B, dan termasuk instansi yang masih muda, kemudian wilayah Kabupaten Wonosobo belum pernah mengalami bencana yang massif atau berdampak sangat besar, sehingga tidak mendapat bantuan peralatan dari BNPB.

Aspek terakhir yaitu mengenai tingkat responsivitas BPBD Kabupaten Wonosobo seringkali menerima keluhan mengenai lamanya waktu untuk sampai ke lokasi kejadian bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesiapan dari petugas PUSDALOPS BPBD untuk merespon dengan cepat, jarak ke lokasi kejadian bencana yang jauh, dan medan yang sulit untuk sampai ke lokasi kejadian bencana.

2. Faktor – Faktor yang menjadi Kendala Tidak Optimalnya Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Faktor pertama yaitu kurangnya peralatan penunjang kegiatan bencana tanah longsor. Ketersediaan peralatan yang tersedia di kantor BPBD Kabupaten Wonosobo terutama peralatan berat yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana tanah longsor masih belum dimiliki sama sekali. Hal ini bisa menghambat dan membuat lama waktu penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Faktor kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Wonosobo yang masih belum mencukupi baik itu dari jumlah pegawai yang berstatus PNS maupun non PNS. Proses penanggulangan bencana tanah longsor yang memiliki banyak tahapan sehingga memerlukan banyak tenaga dalam setiap prosesnya.

Terakhir yaitu mengenai kurang cepatnya tindakan pemulihan

wilayah terdampak bencana tanah longsor. Tindakan rehabilitasi biasanya memerlukan waktu yang lama karena kecepatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari ketersediaan lahan untuk merelokasi warga, ketersediaan anggaran, dan koordinasi dengan banyak instansi terkait seperti Dinas Permukiman yang bertugas untuk membangun hunian baru.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan kinerja BPBD dalam aspek produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas, maka perlu dilakukan :

Mengembangkan atau menyisipkan format dan materi baru terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana tanah longsor secara lebih spesifik. Misalnya dengan mempertajam serta mengembangkan program desa tanggap bencana menjadi program keluarga tanggap bencana (KATANA).

Mengoptimalkan penggunaan peralatan – peralatan yang sudah dimiliki oleh BPBD Kabupaten Wonosobo yang dapat dimanfaatkan

untuk mengurangi resiko maupun dampak yang bisa ditimbulkan akibat adanya tanah longsor yaitu alat Landslide Early Warning System (LEWS).

Menerapkan atau menetapkan standar waktu respon (respond time rate) untuk sampai ke lokasi bencana dalam kurun waktu tertentu agar ada standar pasti, seperti yang dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran dengan waktu sampai ke lokasi bencana selama maksimal 15 menit.

2. Untuk mengurangi kendala yang membuat tidak optimalnya kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor, maka perlu dilakukan :

Memastikan peralatan yang sudah ada di desa seperti alat LEWS berjalan dengan baik melalui pemanfaatan Babinsa untuk memelihara dan merawat alat agar tetap bisa berfungsi normal.

Mengoptimalkan peran dari pemerintah desa dalam membina relawan atau mengedukasi masyarakat akan bahaya terjadinya

bencana tanah longsor, karena desa juga sebenarnya mempunyai anggaran untuk penanggulangan bencana.

Membuat kebijakan atau memperbaharui peraturan yang berkaitan dengan tindakan pascabencana terutama persoalan perumahan masyarakat yang terkena dampak bencana. Peraturan yang mengatur hal tersebut perlu untuk diperbaharui agar lebih jelas dan konkrit serta sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.

Dwiyanto, Agus. (2008) *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP. Dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veitzal. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Siagian,S.P (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sembiring, Masana. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

- Awusi, Biyan Anugrah, Herman Nayoan, Jones Tompodung. 2018. “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir”. Volume 1, No 1.
- Sirapati, Fendi Irawan. 2015. “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat”. Volume 3, No 4.
- Suri, Nur Khotimah. 2015. “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Bencana

Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo”. Volume 8, No. 1.

Wulansari, Diah. 2017. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana”. Volume 4, No 3.

Wang, Wen Jiun. 2019. “*Disaster Response After Extreme Events in Taiwan: The Influence of Formal Institutions on Inter-Organizational Interaction*”. Volume 10, No 1.

Wong, Lee Dae. 2019. “*Collaboration and Performance in disaster and emergency management: Focusing on South Korea*”. Volume 35.

Dokumen

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA BNPB) No 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten Wonosobo tahun 2018.

Internet

<https://wonosobokab.go.id> (diakses pada 5 November 2019)

<https://jateng.tribunnews.com> (diakses pada 12 November 2019)

<https://bnpb.cloud/dibi/> (diakses pada 11 Oktober 2019)

<https://bpbd.wonosobokab.go.id/> (diakses pada 10 November 2019)